

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- Agus Wijayanto, "Data BPN Tentang Kegiatan Pertanahan", Materi disampaikan pada Webinar *Program Doktor Hukum: Strategi Pemberantasan Mafia Tanah Demi Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2021), hlm 24-25
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 78
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indriati. S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogjakarta.
- Maria Farida Indriati. S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogjakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis & Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung.

- Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Airlangga, Jakarta, 2009.
- Mudakir Iskandar Syah, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Aceh: Unimal Press.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Sirajuddin, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- , 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

## **Jurnal**

Ana Silviana, Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 4, No 1, 2021, hlm, 52.

Arifin Bur dan Desi Apriani, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, *UIR Law Review* Vol 01, No 02, Oktober 2017, hlm, 129.

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol 1, No 2, September 2016, hlm, 398-399.

Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, dan Fifiana Wisnaeni, Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional, *Jurnal Notarius*, Vol 13, No 1, 2020, hlm, 155.

Sajipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, April 2005, hlm. 3-5.

Suci Febrianti. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik." *Indonesian Notary Journal*, Vol. 3, no. 3.

Tika Nurjannah Dan Firman Mui, Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), *Jurnal Tumalebbi*, Vol 3, No 2 Juni 2016, hlm, 137.

## **Peraturan Pemerintah**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## **Sumber Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Oline atau dalam jaringan, <https://kbbi.web.id/atur>

